

Masyarakat Muslim Kamboja Pasca Rezim Khmer Merah: Penindasan, Perlawanan, dan Kebangkitan

Pipi Emi Julianti¹, Yana Safitri², Reka Seprina³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi

Email Korespondensi: pipiemijulianti@gmail.com

Naskah Diterima: 21 Mei 2024 Naskah Direvisi: 15 September 2024 Naskah Disetujui: 20 Desember 2024

ABSTRACT

The Muslim community in Cambodia, primarily composed of Cham and Malay ethnic groups, faced severe persecution under the Khmer Rouge regime (1975–1979). The regime's repressive policies included the suppression of religious freedom, destruction of places of worship, and executions of Muslim leaders and figures. This oppression led to resistance, although the Muslim uprising in Cambodia was quickly suppressed. After the fall of the Khmer Rouge in 1979, the Cambodian Muslim community began rebuilding their lives. This revitalization process included restoring international networks, economic recovery, rebuilding religious and educational infrastructure, and fighting for civil rights. This study employs a historical approach using heuristic methods, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that following the fall of the Khmer Rouge, the Cambodian Muslim community gradually regained their rights and started contributing to Cambodia's social, economic, and political landscape.

Keywords: *Cambodian Muslims, Khmer Rouge, persecution, resistance, revival*

PENDAHULUAN

Komunitas Muslim di Kamboja terutama terdiri dari etnis Cham dan Melayu yang menjadi warga negara Kamboja setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Mereka merupakan kelompok etnis dengan identitas keagamaan yang berbeda dari mayoritas penduduk Kamboja yang menganut agama Buddha. Sebagai kelompok agama minoritas, mereka menghadapi berbagai tantangan, terutama saat Kamboja diperintah oleh rezim Khmer Merah. Pada masa itu, kehidupan umat Islam Kamboja menjadi sangat sulit dan penuh penderitaan (Maunati & Sari, 2013:11).

Khmer Merah, sebuah rezim komunis, memerintah Kamboja selama kurang lebih empat tahun sebelum akhirnya digantikan oleh pemerintahan baru. Selama periode ini, rezim Khmer Merah memberikan dampak yang sangat besar terhadap populasi Muslim Kamboja, di mana mereka mengalami berbagai bentuk penindasan dan penderitaan yang luar biasa (Adi, 1989:71). Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Khmer Merah menyebabkan ketegangan di antara kelompok minoritas di Kamboja, khususnya komunitas Muslim. Akibatnya, banyak harta benda mereka yang dirampas, dan kehidupan mereka semakin terpuruk akibat penindasan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Hingga rezim Khmer Merah berakhir pada tahun 1979, komunitas Muslim Kamboja masih berada dalam kondisi yang sulit. Namun, jatuhnya Khmer Merah memberikan harapan baru bagi mereka. Meskipun masih menghadapi tekanan dan ketidakpastian, kondisi komunitas Muslim perlahan membaik. Memasuki tahun 1980, mereka mulai lebih diterima dalam masyarakat dan berupaya membangun kembali kehidupan mereka. Periode ini dapat dianggap sebagai era kebangkitan bagi Muslim Kamboja setelah empat tahun mengalami penindasan dan pembantaian massal yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa (Okawa, 2014:40).

Pasca-kejatuhan rezim Khmer Merah, minoritas Muslim Kamboja berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan melanjutkan kehidupan secara normal. Namun,

penderitaan dan trauma akibat kekejaman rezim Khmer Merah masih membekas dalam ingatan mereka hingga bertahun-tahun kemudian.

METODOLOGI

Teknik sejarah merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Notosusanto (1971), teknik penelitian sejarah terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber sekunder melalui metode analisis dokumen. Dalam penelitian ini, sumber tersebut dapat berupa arsip-arsip yang membahas tentang Masyarakat Muslim Kamboja Pasca Rezim Khmer Merah atau jurnal-jurnal yang mengkaji slogan-slogan yang digunakan pada periode penyebaran Islam saat itu (Gottschalk, 1985). Pada tahap kedua, yaitu kritik sumber, dilakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian sumber, sedangkan kritik internal digunakan untuk menilai kredibilitas isi sumber tersebut. Setelah itu, pada tahap analisis dan interpretasi, peneliti memilih sumber sejarah yang relevan dengan kajian penelitian (Kuntowijoyo, 1955). Dalam tahap ini, sumber-sumber sekunder yang memiliki kesamaan tema dan subtema dikategorikan dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumen lainnya. Fakta-fakta yang telah diinterpretasikan kemudian dicatat secara sistematis dan berurutan. Pada tahap akhir, yaitu historiografi, peneliti menyusun dan memaparkan temuan mengenai Masyarakat Muslim Kamboja Pasca Rezim Khmer Merah (1979-1980) berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Masyarakat Kamboja

Kamboja, yang dahulu dikenal sebagai Kampuchea, adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung barat daya Indochina. Negara ini merupakan bekas jajahan Prancis dengan ibu kota di Phnom Penh. Kamboja berbatasan dengan Thailand di barat dan selatan, Vietnam di timur, serta Laos di utara. Negara ini memiliki luas wilayah 181.035 kilometer persegi dan garis pantai sepanjang kurang lebih 560 kilometer. Selain itu, Kamboja juga menjadi rumah bagi Sungai Mekong yang membentang sepanjang 540 kilometer dan menyediakan tanah subur (Dharma, 2011:21).

Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Kamboja karena ketersediaan lahan yang luas. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, dengan sektor pertanian menyerap sekitar tiga perempat tenaga kerja di negara tersebut. Komoditas utama yang dihasilkan adalah padi dan karet. Secara etnis, masyarakat Kamboja tergolong homogen, karena hampir seluruh penduduknya berasal dari etnis Khmer yang telah menetap sejak abad ke-2 Masehi. Namun, terdapat pula kelompok etnis minoritas seperti Laos, Vietnam, Thailand, Tionghoa, dan Melayu Cham, yang merupakan kelompok etnis terkecil di negara tersebut (Adi, 1989:71).

Agama Buddha merupakan agama mayoritas di Kamboja. Hampir seluruh penduduknya menganut agama Buddha, sementara sisanya beragama Kristen, Islam, atau menganut kepercayaan animisme. Meskipun mayoritas penduduk beragama Buddha, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas jarang terjadi. Masyarakat Kamboja hidup berdampingan secara harmonis, mencerminkan keragaman budaya yang unik.

Dalam sejarahnya sebagai kerajaan dan negara merdeka, Kamboja telah mengalami berbagai pergolakan politik dan kepemimpinan yang berubah-ubah. Beberapa perselisihan dan krisis terjadi sebelum rezim Khmer Merah merebut kekuasaan di Kamboja (Maunati & Sari, 2013:11). Pada masa itu, komunitas Muslim Kamboja terlibat dalam konflik vertikal dengan rezim Khmer Merah. Kehidupan masyarakat Muslim Kamboja yang sebelumnya harmonis dengan komunitas etnis lain perlahan berubah seiring kebijakan kepemimpinan rezim yang semakin represif. Seperti halnya negara-negara lain di kawasan tersebut, Kamboja turut mengalami konflik akibat perbedaan agama.

Mengenal Masyarakat Muslim Kamboja

Proses dakwah Islam di Kamboja hanya berlangsung hingga pemerintahan Sihanouk. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat Kamboja, khususnya etnis Khmer, untuk memeluk Islam. Mayoritas penduduk tetap menganut agama Buddha, sementara Muslim di Kamboja sebagian besar berasal dari etnis minoritas Cham dan Melayu (Dharma, 2011:22). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang komunitas Muslim dari etnis Cham dan Melayu di Kamboja, terutama sejak berakhirnya pemerintahan Sihanouk dan naiknya rezim Khmer Merah. Kebijakan dan tindakan rezim Khmer Merah berdampak signifikan terhadap populasi Muslim Kamboja. Setelah rezim tersebut berakhir, penyebaran Islam di Kamboja tampak terus berlanjut dan mulai diterima oleh berbagai etnis lain, meskipun dalam jumlah kecil.

Menurut Okawa (2014:43), komunitas Muslim Kamboja dari etnis Cham dan Melayu memiliki beberapa kekhasan. Perbedaan ini berkaitan dengan waktu serta motivasi kedatangan mereka. Muslim Cham bermigrasi dari Kerajaan Champa yang terletak di pesisir Vietnam Selatan setelah ibu kota mereka diserang oleh Vietnam Utara. Akibat tekanan tersebut, suku Cham mengungsi ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Mereka cenderung berpindah ke daerah-daerah yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Champa, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, bahkan Indonesia, karena suku Cham memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Majapahit.

Pada masa itu, suku Cham dikenal memiliki sistem maritim yang canggih, yang memungkinkan mereka berlayar dan berkomunikasi dengan masyarakat dari negara lain, khususnya etnis Melayu. Mayoritas Muslim Cham yang meninggalkan wilayah asal mereka adalah korban serangan etnis Viet, yang menganggap Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Di Kamboja, orang Cham diterima dengan baik dan berbaur dengan suku Khmer, penduduk asli Kamboja (Kiernan, 2022). Salah satu raja Kamboja bahkan memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Ibrahim.

Selain kedatangan suku Cham yang membawa ajaran Islam, suku Melayu juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di Kamboja. Namun, berbeda dengan suku Cham yang datang karena terdesak situasi politik dan peperangan, suku Melayu masuk ke Kamboja melalui jalur perdagangan. Meskipun terdapat perbedaan dalam latar belakang kedatangan mereka, hal ini tidak terlalu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Islam. Bagi komunitas Muslim Kamboja, Islam tetap menjadi identitas utama dan pemersatu mereka (Okawa, 2014).

Kondisi Masyarakat Muslim Kamboja 1975-1979

Pada tahun 1975, sebuah kelompok politik mulai mendapatkan pijakan dalam kekuasaan Kamboja setelah para pemberontak berhasil merebut kendali. Khmer Merah

merupakan organisasi yang berlandaskan ideologi komunisme. Nama *Khmer Merah* sendiri merupakan julukan yang diberikan oleh Raja Sihanouk kepada kelompok pemberontak komunis pada tahun 1960. Meskipun demikian, paham komunisme di Kamboja sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1940. Sejak saat itu, kelompok komunis kerap melakukan provokasi melalui selebaran dan media (Republic, 1974). Seiring waktu, doktrin komunisme di Kamboja semakin berkembang, beriringan dengan meningkatnya nasionalisme masyarakat serta maraknya seruan antikolonial terhadap Prancis.

Setelah berhasil merebut kekuasaan, Khmer Merah dengan cepat menguasai wilayah-wilayah strategis di ibu kota Kamboja. Langkah pertama yang mereka ambil adalah memutuskan semua komunikasi Kamboja dengan dunia luar. Setelah itu, rezim Khmer Merah segera melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Delapan Poin Rencana, yang mencakup beberapa langkah utama, antara lain:

1. Mengevakuasi seluruh penduduk kota ke pedesaan.
2. Menutup semua pasar dan menghentikan seluruh aktivitas jual beli.
3. Menarik semua mata uang periode Lon Nol dan menggantinya dengan mata uang revolusioner yang akan diterbitkan.
4. Memecat seluruh pendeta Buddha dan mewajibkan mereka untuk bekerja di sektor pertanian, terutama menanam padi.
5. Mengeksekusi semua anggota pemerintahan Lon Nol, dimulai dari pemimpin tertinggi.
6. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh wilayah Kamboja dan mempertemukan pemimpin-pemimpinnya.
7. Mengusir seluruh etnis minoritas Vietnam dari Kamboja.

Menurut Dharma (2011:23), kebijakan yang paling mencolok dalam Delapan Poin Rencana ini adalah relokasi massal penduduk ke pedesaan serta penghapusan rezim Lon Nol. Lon Nol dianggap sebagai simbol eksploitasi dan menjadi target utama pembunuhan oleh Khmer Merah. Selain itu, Khmer Merah membagi wilayah Kamboja ke dalam tujuh zona administratif, yaitu barat laut, utara, timur laut, timur, tengah, barat daya, dan barat. Mereka juga membagi masyarakat Kamboja ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok "tua" dan "muda." Sebagai bentuk kesetaraan sosial, seluruh warga Kamboja diwajibkan mengenakan pakaian hitam. Khmer Merah juga menerapkan kebijakan pemisahan keluarga dengan mengisolasi anak-anak dari orang tua mereka serta melatih mereka menggunakan senjata, karena anak-anak dianggap masih "murni" dan belum terpengaruh oleh doktrin lama.

Ketika Khmer Merah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dihuni oleh komunitas Muslim, mereka menerapkan kebijakan khusus terhadap umat Islam. Kebijakan ini dituangkan dalam Lima Poin Rencana, yang mencakup aturan sebagai berikut:

1. Semua perempuan Muslim harus memotong rambut mereka dan dilarang mengenakan jilbab.
2. Semua salinan Al-Qur'an harus dimusnahkan.
3. Muslim Cham diwajibkan untuk memelihara babi sebagai hewan peliharaan.
4. Shalat dilarang, dan semua tempat ibadah umat Islam harus ditutup.
5. Muslim Cham, baik laki-laki maupun perempuan, diharuskan menikah dengan pasangan non-Muslim.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 1975, sebelum Konstitusi Khmer Merah disahkan. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Islam. Namun, umat Islam pada saat itu tidak memiliki pilihan selain mengikuti peraturan yang diberlakukan. Pada 5 Januari 1976, pemerintah Khmer Merah secara resmi mengeluarkan Konstitusi Kampuchea Demokrat, yang terdiri dari 15 bab dan 21 pasal. Konstitusi ini mengatur berbagai aspek kehidupan negara, termasuk dasar negara, ekonomi, budaya, kebijakan luar negeri, serta pasal-pasal terkait agama dan ibadah (Republic, 1974).

Konstitusi tidak menjelaskan etnis minoritas; sebaliknya, hal ini menjelaskan kebijakan pengusiran etnis Vietnam. Hal ini merupakan buntut dari konflik antara Khmer Merah dan pemerintahan Vietnam. Secara teori, pemerintahan Khmer Merah tidak memandang perbedaan etnis di Kamboja sebagai sebuah kekhawatiran. Kepemimpinan Khmer Merah menganggap semua warga Kamboja setara, tanpa memandang etnis atau status, selama mereka mengikuti cita-cita negara dan komitmen individu.

Tiga tahun setelah pemerintahan Khmer Merah mengambil alih kekuasaan di Kamboja, dilaporkan bahwa sekitar 2,5 juta dari 7 juta penduduk Kamboja meninggal. Orang-orang Kambojia meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan pembantaian. Ini bisa dianggap sebagai genosida atau pembunuhan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Ysa Osman, sekitar 500.000 dari 700.000 umat Islam di Kamboja meninggal akibat hal yang sama. Sebanyak 113 masjid dihancurkan atau diubah fungsinya. Banyak tokoh penting Islam telah dibunuh atau dibantai. Selain itu, beberapa pemimpin tinggi Muslim dengan jabatan penting di pemerintahan juga dieksekusi. Selain mengeksekusi umat Islam, mereka juga dilarang mengenakan pakaian Islami seperti topi dan sarung, bahkan Alquran sebagai pedoman mereka pun menjadi sasaran perusakan. Aktivitas Khmer Merah dilatarbelakangi oleh kesetiaan kepada rezim Lon Nol, kebijakan diskriminatif, dan etnis (Republic, 1974).

Kegiatan ini memicu reaksi di kalangan Muslim Kamboja. Kebijakan Khmer Merah terhadap Muslim Kamboja menimbulkan protes dan gerakan sosial. Pada tahun 1975, Muslim Kamboja mengorganisir pemberontakan untuk menolak tujuan pemerintah Khmer Merah yang digariskan dalam Rencana Lima Poin, yang tampaknya memaksa umat Islam. Dan umat Islam menolak bergabung dengan Khmer Merah karena ideologi mereka menentang mereka. Hal inilah yang memicu pemberontakan umat Islam di Kampung Cham (Dy, 2007:17). Namun pemberontakan tersebut dengan cepat dapat diredam karena tidak mendapat simpati dari pihak lain. Khmer Merah kemudian menghancurkan pemukiman Muslim yang ada dan memandang Muslim Kamboja sebagai musuh internal. Khmer Merah melacak setiap pergerakan umat Islam di Kamboja (Coedes, 1981:8).

Pada tahun 1978, ia dianggap telah mencapai puncaknya karena kekhawatiran akan perluasannya yang berlebihan. Pada pertengahan Juli 1978, terjadi pemberontakan besar-besaran melawan rezim Khmer Merah. Rakyat dan tentara Kamboja memimpin pemberontakan yang menyebar ke seluruh wilayah. Pemberontakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Kamboja, namun karena kurangnya kekuatan militer, akhirnya dapat diredam. Setelah invasi Vietnam, dorongan untuk memberontak semakin kuat karena mereka tidak lagi sendirian; banyak warga sipil dan tentara Vietnam mendukung mereka. Pada tanggal 9 Januari 1979, Khmer Merah menyerahkan kekuasaan kepada Front Pembebasan Nasional Kamboja.

Kebangkitan Masyarakat Muslim Kamboja 1979-1980

Kamboja mengalami pergolakan sosial, politik, dan agama yang sangat besar setelah kediktatoran Khmer Merah jatuh pada tahun 1979. Antara tahun 1975 dan 1979, kediktatoran Khmer Merah, yang dipimpin oleh Pol Pot, membatasi kebebasan beragama dan membuka praktik keagamaan. Selama masa ini, komunitas Muslim di Kamboja menghadapi penindasan dan kebrutalan yang parah. Setelah kediktatoran Khmer Merah jatuh pada tahun 1979, Kamboja mengalami kemajuan signifikan dalam banyak bidang kehidupan, termasuk kebebasan beragama. Awalnya, pemerintahan baru fokus pada rehabilitasi dan pembangunan kembali kehidupan komunitas Muslim Kamboja.

So (2011:46) berpendapat bahwa sejumlah tindakan dilakukan untuk memulihkan dan membela kebebasan beragama komunitas Muslim. Pemerintah Kamboja secara resmi mengakui Islam sebagai salah satu agama yang diakui negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada komunitas Muslim Kamboja, memungkinkan mereka untuk bebas beribadah dan menjalankan agama mereka. Pada masa ini, masjid dan pesantren mulai dibuka kembali, dan kegiatan keagamaan bisa dilakukan secara bebas. Dalam situasi ini, komunitas Muslim Kamboja sedang berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka yang hancur dan menghadapi tantangan baru.

Pada tahun 1980an, komunitas Muslim Kamboja berjuang untuk memulihkan organisasi keagamaan yang telah dihancurkan oleh kebijakan Khmer Merah. Meski menghadapi tantangan, mereka tetap bertahan dalam upaya membangun masjid, sekolah agama, dan bangunan sosial lainnya. Pada saat yang sama, populasi Muslim di Kamboja membantu membangun kembali infrastruktur sosial dan ekonomi negara tersebut. Mereka berusaha untuk mengatasi trauma masa lalu dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selama masa ini, kelompok-kelompok Islam di seluruh dunia memberikan bantuan yang berharga kepada komunitas Muslim di Kamboja (So, 2011).

Proyek bantuan dan pembangunan dilakukan untuk membantu memperbaiki fasilitas keagamaan dan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan populasi Muslim. Meskipun terdapat banyak hambatan, kehidupan minoritas Muslim di Kamboja pada tahun 1980an menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pembaharuan. Komunitas Muslim terus berupaya meningkatkan identitas agamanya dan berkontribusi pada pembangunan Kamboja secara umum. Kemajuan dan perkembangan ini mengatasi berbagai permasalahan, termasuk jaringan di seluruh dunia, sosial-keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak sipil.

a. Jaringan Internasional

Kamboja telah membangun hubungan dengan negara-negara dan organisasi-organisasi Islam di seluruh dunia. Pemerintah telah memperluas kerja samanya dengan Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Teluk di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal ini telah membantu memperkuat hubungan Kamboja dengan dunia Muslim pada umumnya. Menyusul jatuhnya rezim Khmer Merah, organisasi-organisasi Islam internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Arab meningkatkan upaya mereka untuk membantu rekonstruksi Kamboja dan pertumbuhan populasi Islam di negara tersebut. Mereka memberikan bantuan finansial dan teknis sekaligus mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan antara Kamboja dan negara-negara Muslim lainnya (Dy, 2007:19). Berkembangnya masyarakat Islam di Kamboja mengakibatkan meningkatnya

hubungan dengan negara-negara Muslim lainnya. Indonesia, Malaysia, dan Brunei meningkatkan kolaborasi ekonomi, pendidikan, dan budaya mereka dengan Kamboja. Hal ini meningkatkan hubungan diplomatik Kamboja dengan negara-negara Muslim. Jaringan internasional juga memfasilitasi pertukaran budaya antara organisasi Muslim di Kamboja dan negara Muslim lainnya. Pertukaran budaya ini melibatkan berbagi seni, musik, masakan, dan tradisi lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup umat Islam di Kamboja, namun juga memperkuat koneksi Muslim global.

b. Sosial-religius

Kamboja telah pulih dari dampak buruk Khmer Merah. Kebebasan beragama merupakan sebuah kemajuan besar. Rezim Khmer Merah sangat membatasi dan menindas praktik keagamaan. Coedes (Coedes, 1981:10) mengatakan bahwa setelah kediktatoran jatuh, komunitas Muslim Kamboja bebas menjalankan agama mereka tanpa takut akan penganiayaan atau prasangka. Seiring dengan kebangkitan komunitas Islam, masjid-masjid yang pernah dirusak atau dihancurkan pada masa Khmer Merah dipugar dan dibangun kembali. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk bertemu, beribadah, dan membangun identitas keagamaan mereka. Komunitas Islam yang teraniaya oleh kediktatoran Khmer Merah harus direhabilitasi dan dibina dengan baik.

Menurut Milton (2004) setelah jatuhnya pemerintahan, berbagai upaya dilakukan untuk membangun kembali komunitas mereka melalui program bantuan sosial, peningkatan infrastruktur, dan dukungan psikososial. Kelahiran kembali komunitas Islam mencakup inisiatif untuk memperkuat komunikasi antaragama. Hal ini memerlukan kerja sama dengan komunitas Islam dan agama lain untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi, dan kerja sama guna mencapai perdamaian dan keharmonisan sosial. Setelah jatuhnya kediktatoran Khmer Merah, penduduk Islam di Kamboja mulai berpartisipasi aktif dalam proses politik. Mereka bergabung dengan partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan kepentingan mereka dan membuat pandangan mereka didengar.

c. Ekonomi

Kemajuan ekonomi Kamboja telah menciptakan peluang baru bagi komunitas Muslim. Pemerintah telah mendukung investasi di berbagai industri, termasuk pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan keberhasilan ekonomi telah menciptakan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi umat Islam di Kamboja. Menyusul jatuhnya kediktatoran Khmer Merah, pemerintahan baru Kamboja bebas memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, transit, dan jaringan energi. Peningkatan infrastruktur akan meningkatkan keterhubungan dan mobilitas ekonomi antar masyarakat, khususnya umat Islam (Farouk & Yamamoto, 2008).

Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, pemerintahan yang lebih stabil dan lingkungan yang lebih aman dapat menarik investor di berbagai bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan populasi Muslim. Investasi dapat membantu meningkatkan output dan menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kamboja memiliki potensi pertanian yang signifikan. Pemerintah dapat memprioritaskan pengembangan sektor pertanian, khususnya bantuan kepada masyarakat Islam yang berminat pada bidang pertanian (Dy, 2007:19). Peningkatan hasil pertanian akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi

masyarakat Muslim. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan kewirausahaan, keuangan mikro, dan pembentukan koperasi untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di kalangan komunitas Muslim. Kamboja memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama mengingat warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan cara yang menghormati prinsip dan tradisi Islam, menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

d. Pendidikan

Setelah jatuhnya kediktatoran Khmer Merah, sistem pendidikan Kamboja mengalami kemajuan. Pasca kekuasaan, Khmer Merah yang terkenal menindas agama, termasuk Islam, mulai memulihkan kebebasan beragama di Kamboja. Komunitas Muslim diberikan hak untuk secara terbuka mengamalkan keyakinannya dan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Madrasah (sekolah agama Islam) mulai bermunculan di Kamboja. Madrasah memberikan pendidikan agama Islam kepada generasi muda Muslim, yang meliputi Alquran, doktrin Islam, dan pengetahuan umum. Hal ini memberikan peluang bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan identitas agama dan budayanya (Coedes, 2010).

Setelah masa Khmer Merah, banyak inisiatif dilakukan untuk meningkatkan akses setiap orang terhadap pendidikan, termasuk komunitas Muslim Kamboja. Pemerintah dan kelompok non-pemerintah berkolaborasi untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah dasar dan menengah. Hal ini meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Muslim. Pendidikan agama Islam juga berkembang pesat seiring dengan meningkatnya komunitas Islam di Kamboja. Berbagai program pendidikan agama ditingkatkan dan diperluas, termasuk yang mengajarkan Al-Quran, hadis, ajaran Islam, dan prinsip-prinsip moral Islam. Hal ini mendorong identifikasi agama dan pemahaman Islam dalam komunitas Muslim. Ada juga upaya yang dilakukan untuk melatih instruktur bersertifikat dalam pendidikan Islam. Pelatihan guru Muslim meningkatkan kualitas pengajaran di madrasah dan sekolah yang menawarkan program pendidikan Islam. Guru yang terlatih dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Muslim (Farouk & Yamamoto, 2008).

e. Memperoleh hak-hak sipil

Selain masalah pendidikan, umat Islam Kamboja menghadapi kesulitan dalam memperoleh kebebasan sipil dan beragama. Meskipun kediktatoran Khmer Merah telah berakhir, warisannya masih terlihat di masyarakat. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap komunitas Muslim terus berlanjut. Namun, dengan bantuan masyarakat dunia dan upaya umat Islam Kamboja sendiri, mereka memperjuangkan hak-hak mereka dan penghapusan segala jenis prasangka. Setelah pemerintahan Khmer Merah yang anti-agama, komunitas Muslim Kamboja mulai menikmati banyak kebebasan. Mereka bebas menganut agamanya tanpa batasan atau pembatasan. Hukum Kamboja kini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi penduduk Muslim. Mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh konstitusi Kamboja dan diperlakukan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum (Okawa, 2014:45).

Komunitas Muslim Kamboja menjadi lebih terlibat dalam politik. Mereka mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai pemilih dan pejabat terpilih baik di tingkat lokal maupun nasional. Akses terhadap pendidikan bagi umat Islam juga meningkat. Sekolah Islam dibuka kembali, dan pendidikan agama Islam diizinkan. Selain itu, nilai-nilai

budaya Islam diakui dan dihargai dalam budaya Kamboja secara keseluruhan. Pemerintah Kamboja dan kelompok internasional berupaya memulihkan infrastruktur yang rusak akibat konflik. Hal ini membawa dampak baik bagi umat Islam, termasuk terhadap pembangunan masjid dan bangunan keagamaan lainnya (Coedes, 2010). Pertumbuhan komunitas Muslim Kamboja juga menarik perhatian internasional. Organisasi-organisasi mitra dan negara-negara mempromosikan hak asasi manusia dan melindungi populasi Muslim sekaligus membantu rehabilitasi pasca-konflik.

SIMPULAN

Setelah jatuhnya kediktatoran Khmer Merah, komunitas Muslim di Kamboja mulai mengalami kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam jaringan internasional, sosial-keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak sipil. Masyarakat Muslim berupaya merevitalisasi Islam dengan berbagai metode yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan positif di banyak bidang kehidupan. Upaya rehabilitasi ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterapkan dalam masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan.

Memasuki tahun 1980-an, komunitas Muslim Kamboja mulai membangun kembali jaringan internasional dengan menjalin kerja sama lebih erat dengan Malaysia, Indonesia, serta negara-negara Teluk dalam sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di ranah sosial-keagamaan, kebebasan beragama menjadi isu penting yang terus diperjuangkan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak sipil di Kamboja pasca-rezim Khmer Merah.

Antara tahun 1979 dan 1980, minoritas Muslim Kamboja mengalami pemulihan di berbagai sektor kehidupan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, mereka tetap berupaya untuk membangun kembali komunitasnya dan mencari kehidupan yang lebih baik setelah mengalami masa kelam di bawah kediktatoran Khmer Merah.

REFERENSI

- Adi. (1989). *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 7*. PT Cipta Pustaka.
- Kiernan, B. (2022). *Introduction: Conflict in Cambodia, 1945- 2002*. . Critical Asian Studies.
- Coedes, G. (1981). *Sejarah Champa dari Awal Sampai Tahun 1471, dalam Kerajaan Champa*. Balai Pustaka.
- Coedes, G. (2010). *Sejarah Asia Tenggara Masa Hindu Budha*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dharma, P. (2011). *Kepulauan Indonesia dan Champa. Dalam Panggung Sejarah, Henry Chambert-Loir dan Hasan Mua'rif Ambary (ed)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Dy, K. (2007). *A History of Democratic Kampuchea 1975- 1979*. Phom Penh: Deocument Center of Kampuchea. "Komuniskasi Phnom Penh di Putus. Kompas.
- Farouk, O., & Yamamoto, H. (2008). *Islam at the Margins: The Muslim of Indocina*. Center of Integrated Area Studies.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Kuntowijoyo. (1955). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Maunati, Y., & Sari, B. R. (2013). *The Cham Diaspora in Southeast Asia Social Integration and Transnational the Case of Cambodia*. LIPI Press.

- Milton, O. (2004). *The Khmer Islam Community in Cambodia and its Foreign Patrons*. Lowy Institute for International Policy.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah*. Dephankam.
- Okawa, R. (2014). Hidden Islamic Literature in a Cambodia: The Cham in the Khmer Rouge Period. *International & Regional Studies*.
- Republic, K. (1974). *The Martydrom of khmer Muslim*. Decho Damdin Printing Press.
- So, F. (2011). *The Hijab of Cambodia Memories of Cham Muslim Women After the Khmer Rouge*. Document Center of Cambodia.